

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN FLORES TIMUR

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD KABUPATEN Flores Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Larantuka, Januari 2024

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN FLORES TIMUR,



Ir. YOHANIS KOPONG

NIP. 19660226 199403 1 003

## IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut: Target dari Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yakni Kualitas Layanan Sekretariat terhadap Peran DPRD sesuai fungsinya dibandingkan dengan realisasi yang dicapai berdasarkan indikator pada tingkat Kepuasan Layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Tabel Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Flores Timur Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terwujudnya peningkatan kelancaran fasilitasi dan pelayanan kepada DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	95	80,90	100

Tingkat Capaian kinerja tersebut di atas sampai dengan akhir Bulan Desember 2023 didasarkan pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur. Adapun program dan kegiatan yang menjadi *sentral* dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Di luar indikator sasaran strategis, salah satu pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan fasilitasi pembahasan Pembentukan Peraturan Daerah.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD.
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.
3. Peningkatan ketersediaan Sumberdaya Manusia secara kualitas serta kompetensi sebagai penunjang layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini nantinya akan menjadi acuan untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# BAB I

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

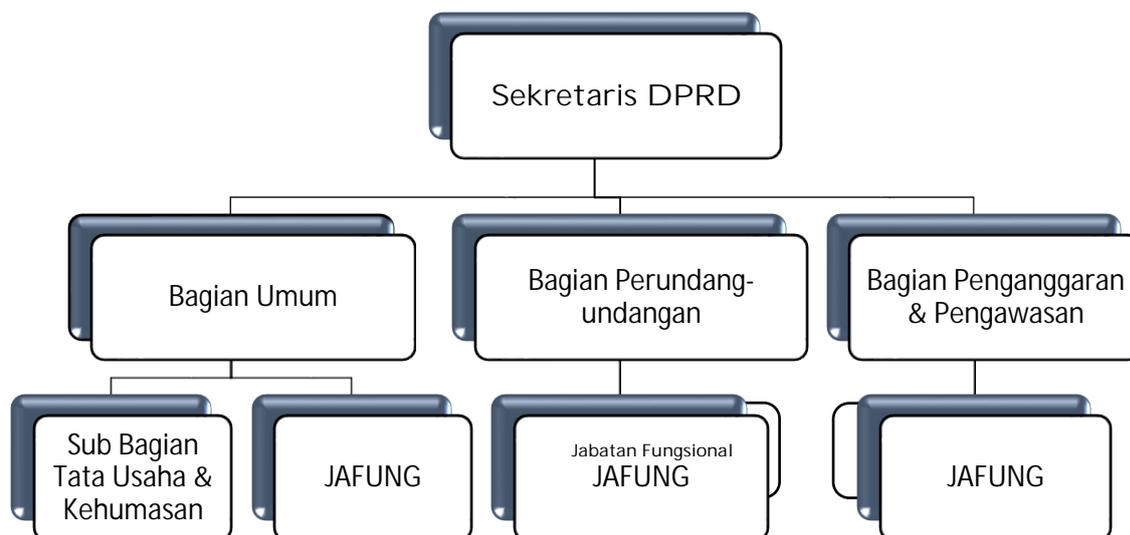
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur.
2. Memotivasi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur, menetapkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan kesekretariatan

DPRD;

- e. Pelaksanaan kebutuhan rumah tangga DPRD; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

### 1.3 Keadaan Pegawai

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2023 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) pegawai / personil dengan komposisi penjelasan sebagai berikut :

#### 1.3.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang

Berdasarkan eselon pemangku jabatan struktural, Sekretariat DPRD dipimpin seorang pejabat eselon IIB (Sekretaris DPRD / *Top manager*), 3 (tiga) orang pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian/ *Middle manager*) dan 6 (enam) orang pejabat eselon IVA (Kepala Sub Bagian/ *Lower manager* ). Untuk distribusi pegawai ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Distribusi pegawai berdasarkan Eselon Dan Golongan Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Eselon	Pangkat, Golongan / Ruang														Jumlah orang			
		I				II				III				IV				Kontra k	
		A	b	c	d	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b		c		d
1.	Eselon IIB															1			1
2.	Eselon IIIA												1		2				3
3.	Eselon IVA											2	4						6
4.	Fungsional Umum					1		3	4	3	5								16
5.	P3K																		6
6.	Kontrak																		20
Jumlah						1		3	4	3	5	2	5		2	1			52

#### 1.3.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Distribusi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur

No	Uraian	Pendidikan
----	--------	------------

		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	Jumlah orang
1.	Eselon IIB							1			1
2.	Eselon IIIA							2	1		3
3.	Eselon IVA			1			1	4			6
4.	Fungsional Umum		1	11			2	2			16
5.	P3K						3	3			6
5.	Pegawai Kontrak	1	1	13			2	3			20
Jumlah		1	2	25			8	15	1		52

Dari data di atas dapat terlihat bahwa mayoritas pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berpendidikan terakhir SLTA yaitu berjumlah 25 orang, kemudian disusul yang berpendidikan S1 atau sederajat berjumlah 15 orang sedangkan yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang.

### 1.3.3 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

Distribusi pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Distribusi pegawai berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan

No	Uraian	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan ( Diklatpim ) Tingkat				Jumlah orang
		I	II	III	IV	
1.	Eselon IIB		1			1
2.	Eselon IIIA			2	1	3
3.	Eselon IVA				1	1
4.	Fungsional Umum					
Jumlah			1	2	2	5

Dari sejumlah pegawai yang ada baik PNS, PPPK ataupun Tenaga Kontrak, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur belum memiliki sumber daya manusia lain seperti :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis ( Staf Fraksi )

## c. Tenaga Outsourcing ( Security / Satpam )

### 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung sumberdaya manusia, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur juga didukung dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

#### 1.4.1 Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan berlokasi di Jalan Yoakim BL. De Rosary Nomor 24 Larantuka. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ± 620 m<sup>2</sup>, merupakan bangunan dua lantai yang terdiri dari beberapa ruang antara lain :

##### Lantai 1 : Ruang Rapat Utama

- Ruang Pimpinan DPRD
- Ruang Lobby
- Ruang staf tatausaha pimpinan DPRD
- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Kepala Bagian bersama staf
- Ruang Bendahara
- Ruang Tunggu (pada sayap kanan bangunan)
- Ruang Perabotan
- Gudang Penyimpanan
- Toilet

##### Lantai 2 : Ruang Operator

- Ruang Komisi
- Ruang Bapemperda

#### 1.4.2 Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

##### 1.4.2.1 Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2023 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD : 3 unit
- Kendaraan roda empat operasional : 2 unit

- Kendaraan roda 2 : 13 unit

#### 1.4.2.2 Sarana Informasi dan Komunikasi

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Jaringan internet, Surat Kabar, Telepon, Faximile.

#### 1.4.2.3 Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Generator set, CCTV, Televisi, APAR, Laptop, komputer/PC, LCD, Sound System, Scanner, AC dll.

Melihat ketersediaan sarana prasarana di Sekretariat DPRD, secara umum relatif mencukupi, namun ada beberapa fasilitas yang perlu ditambahkan seperti kursi rapat pada ruang komisi, AC pada ruang sidang utama, fasilitas pendukung pada ruang perekaman serta kualitas pemeliharaan terhadap seluruh sarana yang ada agar dapat digunakan dengan maksimal. Adapun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.

### 1.5 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Flores Timur. Pada tahun anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.629.611.561,- yang diperuntukkan guna mendukung pelaksanaan 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran startegis maupun program-program pendukung.

### 1.6 Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, Potensi yang menjadi ruang lingkup dan Sistematika penulisan LKIP.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### LAMPIRAN

# BAB II

## Perencanaan Kinerja

### II.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah memiliki pedoman Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang telah tersusun pada Tahun 2022.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

RPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Flores Timur No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur tahun 2023-2026.

#### II.1.1 Visi

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah adalah sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/terakhir dari RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yaitu :

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
- 4) Meningkatnya kualitas SDM;
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah;
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah;
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

#### II.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

##### Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur selama 4 tahun anggaran adalah *"Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat DPRD Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Dalam Menunjang Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif"*.

##### Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN %			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	71	72	73	74

### II.1.3 Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</li> <li>2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.</li> <li>4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</li> </ol> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.</li> <li>- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>- Penyediaan bahan logistik kantor.</li> <li>- Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan.</li> <li>- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa surat menyurat.</li> <li>- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.</li> <li>- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.</li> </ul> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.</li> <li>- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.</li> <li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.</li> <li>- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.</li> <li>- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.</li> </ul> <p>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD</li> <li>• Pelaksanaan Medical Check Up DPRD</li> </ul> <p>Layanan Administrasi DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi Fraksi DPRD</li> <li>- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD</li> </ul>
	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah.</li> <li>- Pembahasan rancangan peraturan daerah.</li> </ul> <p>Pembahasan Kebijakan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembahasan KUA dan PPAS</li> <li>- Pembahasan APBD</li> <li>- Pembahasan APBD Perubahan</li> <li>- Pembahasan Laporan Semester</li> <li>- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</li> </ul> <p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <p>Pendalaman Tugas DPRD</p> <p>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p> <p>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja dalam daerah.</li> <li>- Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.</li> <li>- Pelaksanaan reses.</li> </ul> <p>Fasilitasi Tugas DPRD</p> <p>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</p>

## II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

PROGRAM	Anggaran (Rp)	Keterangan
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.999.785	
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Daerah	2.322.817.071	
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.685.413	
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.075.707	
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.895.770	
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-	
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.630.000	
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	178.317.914	
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	11.297.966.280	
	1.167.635.188	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	709.900.765	
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	129.814.268	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	556.499.644	
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.562.022.825	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	10.350.931	
Total	22.629.611.561	

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan tidak pada Sasaran Perangkat Daerah, namun pada besaran

anggaran pada program yang mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah. Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023 didasarkan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk mendukung pencapaian Sasaran Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian/ perubahan besaran anggaran.

## BAB III

# Akuntabilitas Kinerja

### III.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA	TARGET	REALISASI	CAPAIA N
Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	-	22.629.611.561	21.880.912.138	96,69 %

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2023 adalah 97%. Realisasi capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan yakni sebesar 95%. Dengan demikian, hal ini dapat diketahui dari realisasi dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2023.

### III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### III.2.1 Sasaran Kepuasan Layanan Fasilitas terhadap agenda DPRD

Tolok ukur capaian sasaran Kepuasan Layanan Fasilitas terhadap anggota DPRD diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut yaitu indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formula indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Indikator	Formula Indikator
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat terhadap peran DPRD sesuai fungsinya	Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD	Nilai survey kepuasan anggota DPRD

Kinerja sasaran Kepuasan Layanan Fasilitas terhadap agenda DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2022 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1.	Indeks kepuasan layanan terhadap	75	75	76,69	102	78	104

tugas dan fungsi DPRD							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Analisis yang dilakukan terhadap capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD adalah sebagai berikut :

1. Target indikator Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD pada tahun 2023 adalah 74 sedangkan realisasi indikator ini adalah 76,69. Dari kedua skor tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD telah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan melampauinya. Jika diperbandingkan antara target dan realisasinya dapat diketahui pencapaiannya mencapai 104 %.
2. Dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, diketahui bahwa target jangka menengah indikator Indeks kepuasan layanan terhadap pelaksanaan agenda DPRD ditetapkan dengan skor 75. Apabila diperbandingkan dengan realisasi capaian kinerja pada Tahun 2023 yaitu 76,69, maka dapat diketahui hasilnya yakni 102 % yang berarti target indikator untuk indeks kepuasan pada akhir periode lima tahunan sudah tercapai bahkan melampaui.
3. Menurut analisis, faktor pendorong peningkatan kinerja Sekretariat DPRD adalah adanya Komunikasi yang intensif dan efektif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota serta Alat Kelengkapan DPRD, sehingga tatakelola seluruh materi pembahasan dapat tersusun lebih terencana dan dapat menghasilkan pembahasan yang efektif.

### III.3 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 sebesar 96,69 % dari total anggaran yang dialokasikan.

Prosentase, Kinerja dan Realisasi anggaran untuk semua kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI		
		K	Rp.	K	Rp.	
3	4	7		12 = 8+9+10+11		
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>22.629.611.561</b>	<b>619</b>	<b>21.880.912.138</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten</b>			<b>15.661.023.128</b>	<b>596</b>	<b>15.020.084.511</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</b>	<b>100</b>				
	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100</b>				
	<b>Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian kompetensi (%)</b>	<b>100</b>				
	<b>Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)</b>	<b>100</b>				
	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen)</b>	<b>9</b>	<b>65.999.785</b>	<b>15</b>	<b>59.954.500</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	29.998.780	7	29.522.500
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dokumen)	2	12.000.620	3	10.393.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	5	12.000.250	5	10.359.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah (Laporan)	2	12.000.135	3	9.680.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (Dokumen)</b>	<b>13</b>	<b>2.322.817.071</b>	<b>23</b>	<b>1.993.076.464</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(org/bln)	30	2.271.817.071	14	1.942.076.464
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)	9	51.000.000	9	51.000.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)</b>	<b>4</b>	<b>9.685.413</b>	<b>3</b>	<b>8.266.500</b>
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	2	9.685.413	3	8.266.500
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian (Dokumen)</b>	<b>2</b>	<b>18.075.707</b>	<b>2</b>	<b>16.949.100</b>
	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Pelaksanaan Sistem Informasi Kepengawaaian (dokumen)	1	18.075.707	2	16.949.100
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD (%)</b>	<b>50</b>	<b>329.895.770</b>	<b>64</b>	<b>278.289.105</b>

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB B KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	9.994.154	20	9.967.400
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg disediakan (paket)	1	20.143.075	3	19.890.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	59.516.291	4	47.492.500
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	2	60.003.000	4	59.989.319
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan (paket)	2	24.499.250	5	11.778.300
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dok)	3	2.250.000	3	2.250.000
	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)	1	35.000.000	5	8.450.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	118.490.000	20	118.471.586
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</b>	<b>46</b>	<b>270.630.000</b>	<b>42</b>	<b>260.535.096</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)	4	1.500.000	4	1.500.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	20	9.994.154	20	9.967.400
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jml paket peralatan dan perlengkapan Kantor yg disediakan (paket)	1	20.143.075	3	19.890.000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)	1	59.516.291	4	47.492.500
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (paket)	2	60.003.000	4	59.989.319
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan (paket)	2	24.499.250	5	11.778.300
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (dok)	3	2.250.000	3	2.250.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	1	35.000.000	5	8.450.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	20	118.490.000	20	118.471.586
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)</b>	<b>46</b>	<b>270.630.000</b>	<b>42</b>	<b>260.535.096</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (laporan)	4	1.500.000	4	1.500.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	52.330.000	12	48.635.096
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum yg disediakan (laporan)	30	216.800.000	26	210.400.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik Daerah SKPD (%)</b>	<b>45</b>	<b>178.317.914</b>	<b>42</b>	<b>164.687.512</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	3	78.469.937	5	74.796.680
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	17	49.946.123	17	40.911.332
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)	30	-	0	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	4.995.000	2	4.995.000
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	39.967.354	5	39.055.500
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi(unit)	12	4.939.500	13	4.929.000

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI			
<b>Layanan Keuangan &amp; Kesejahteraan DPRD</b>		<b>393</b>	<b>11.297.966.280</b>	<b>360</b>	<b>11.105.251.714</b>	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak (orang)	360	11.252.966.280	360	11.105.251.714
	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up (orang)	30	45.000.000	0	-
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>36</b>	<b>1.167.635.188</b>	<b>45</b>	<b>1.133.074.520</b>	
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (lap)	30	1.167.635.188	45	1.133.074.520
<b>Sekretariat DPRD</b>			<b>6.968.588.433</b>	<b>23</b>	<b>6.860.827.627</b>	
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR</b>		<b>114</b>	<b>6.968.588.433</b>	<b>139</b>	<b>6.860.827.627</b>	
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DI</b>		<b>15</b>	<b>709.900.765</b>	<b>14</b>	<b>651.530.569</b>	
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (dokumen)	5	45.731.781	6	26.152.000
	Pembahasan rancangan perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (dokumen)	5	664.168.984	8	625.378.569
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>		<b>8</b>	<b>129.814.268</b>	<b>15</b>	<b>108.222.300</b>	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (dokumen)	1	20.000.660	4	18.507.500
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (dokumen)	2	30.017.500	4	26.942.500
	Pembahasan APBD perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (dokumen)	2	30.000.140	3	19.535.800
	Pembahasan laporan semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (dokumen)	2	20.001.128	2	18.219.000
	Pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)	1	29.794.840	2	25.017.500

URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023 YANG DIEVALUASI)	REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI			
<b>Layanan Keuangan &amp; Kesejahteraan DPRD</b>		<b>393</b>	<b>11.297.966.280</b>	<b>360</b>	<b>11.105.251.714</b>	
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>		<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>7</b>	<b>556.499.644</b>	<b>32</b>	<b>547.873.758</b>	
	Pendalaman tugas DP	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (dokumen)	5	549.250.000	30	544.138.758
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (dokumen)	1	7.249.644	2	3.735.000
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>65</b>	<b>5.562.022.825</b>	<b>73</b>	<b>5.551.681.000</b>	
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (dokumen)	30	335.328.500	37	331.158.000
	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD (dokumen)	5	25.635.433	6	19.504.000
	Pelaksanaan reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (dokumen)	30	5.201.058.892	30	5.201.019.000
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>16</b>	<b>10.350.931</b>	<b>5</b>	<b>1.520.000</b>	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Banmus (dokumen)	5	10.350.931	5	1.520.000

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang diraih relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran mendekati 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah terealisasi dengan baik sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

# BAB IV

## Penutup

Penyelenggaraan Kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Melihat Hasil laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur yaitu Indeks kepuasan layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pada tahun 2023, indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni sebesar 76,96 % dari target 75 %.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa dalam laporan ini tergambar bahwa Sekretariat DPRD belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan akibat dari berbagai permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain :

- a. Sumber daya manusia dari sisi kualitas yang masih terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD yang belum sesuai dengan agenda / jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan;
- c. Munculnya beberapa regulasi baru terutama yang berkaitan dengan penyusunan APBD Tahun 2023 dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap dokumen dimaksud.
- d. Sarana dan prasarana pendukung baik dari aspek kualitas maupun kuantitas masih belum memadai dalam mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur berupaya untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas dan kuantitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Flores Timur.

Dalam upaya pemecahan atas permasalahan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur perlu melakukan langkah - langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja. Langkah - langkah tersebut adalah :

- a. Perlu kecermatan, ketepatan dan tanggap dalam memberikan fasilitasi dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD;
- b. Konsistensi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD;
- c. Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang potensial melalui pelatihan, kursus dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik;
- d. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif pada internal Sekretariat DPRD baik di tingkat struktural maupun staf, serta secara eksternal dengan OPD terkait.

Demikian LKIP Tahun 2023 ini dibuat, sekiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur kedepannya.